

Implementasi Strategis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) pada TKI di Kabupaten Karanganyar

Resa Melinda Ayu Pratiwi, Rino Ardhian Nugroho

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret

Email: resa.melindaa@yahoo.com

Abstrak

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, penempatan dan perlindungan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2011, dengan mengeluarkan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data-data penelitian ini divalidasi dengan pengujian reliabilitas. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan linier dan hierarkhis (Creswell). Temuan dari penelitian ini adalah SISKOTKLN tidak disosialisasikan pada TKI, Eks-TKI dan PL. Adanya perbaikan teknologi oleh BNP2TKI pada SISKOTKLN membuat Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar tidak lagi menjadi *editor* dalam SISKOTKLN. Diketahui tidak ada ketegasan informasi pendaftaran menjadi TKI oleh BNP2TKI, serta koordinasi antara Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar dengan BNP2TKI kurang, karena data yang diunggah oleh BNP2TKI tidak dapat diakses oleh Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PPTKIS Karanganyar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi strategis SISKOTKLN pada TKI di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar sudah baik, namun masih perlu perbaikan pada beberapa dimensi. Saran yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah mempromosikan SISKOTKLN pada CTKI, Eks-TKI dan PL, menjadikan Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar sebagai *editor* dalam SISKOTKLN, serta menciptakan transparansi informasi pendaftaran menjadi TKI melalui pamflet atau website BNP2TKI.

Kata Kunci: Implementasi Strategis; SISKOTKLN; TKI.

Pendahuluan

Di era yang serba menggunakan teknologi ini, semua informasi yang diperoleh darimanapun, kapanpun dan dalam bentuk apapun dapat diperoleh

dengan mudah hanya dengan sebuah sistem yang *up to date* melalui sebuah program komputersisasi dan jaringan. Jika tidak ada komputer konsep sistem informasi manajemen hanya menjadi teori saja.(Nugroho, 2008: 16-17) Oleh karena itu,

komputerisasi merupakan tindak lanjut dari sistem informasi manajemen. Menurut (Sutabri, 2005: 8) sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Sunyoto, 2014: 40) informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Menurut (O' Brien and Marakas, 2014: 27) manajemen diperlukan dalam sistem informasi sebuah organisasi, sebab mampu menekankan kualitas dan keamanan dari sebuah sistem informasi organisasi. Menurut (McLeod, 1998: 334) *management information system (MIS) as a computer-based system that makes information available to users with similar needs*. Salah satu bentuk sistem informasi manajemen adalah *e-government*. Menurut (Howard, 2001: 6-9) *e-goverment* adalah alat dan teknik untuk membantu pekerjaan pemerintah, seperti dalam melayani pemerintah dan warga.

Salah satu contohnya *e-government* dapat digunakan untuk meningkatkan proses manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, secara efektif dan efisien yang berbentuk *elektronik human resources management (e-HRM)*. e-HRM adalah cara menerapkan strategi sumber daya manusia, kebijakan, dan praktek dalam organisasi melalui kesadaran dan dukungan web-saluran berbasis teknologi. (Ruel and Bondarouk, 2004: 3) e-HRM di Indonesia telah digunakan oleh organisasi publik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan sebutan Pengelolaan Kepegawaian Secara Elektronik sejak tahun 1996. (Kementerian Pekerjaan Umum, 1996) Pengelolaan Kepegawaian Secara Elektronik sering disebut juga dengan sistem kepegawaian.

Sistem kepegawaian fungsinya hampir serupa dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Kesamaan terletak pada, sama-sama digunakan untuk mendata dan

memanajemen sumber daya manusia menggunakan sebuah sistem yang disebut *e-government*, dimana tujuannya sama, yaitu agar fungsi organisasi lebih efektif dan efisien. Perbedaan dari sistem kepegawaian dengan SISKOTKLN adalah dimana sistem kepegawaian digunakan untuk mendata dan manajemen sumber daya calon pegawai dan pegawai, sedangkan SISKOTKLN digunakan untuk mendata dan manajemen para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan memperbaharui data TKI yang melakukan perpanjangan kontrak menjadi TKI atau *re-entry* setelah cuti untuk beberapa waktu.

SISKOTKLN mengacu pada strategi BNP2TKI kedua yaitu menyempurnakan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang mudah, murah dan cepat; dimana dalam strategi tersebut dijelaskan lagi pada Dimensi Kinerja Utama (IKU) nomor enam bahwa BNP2TKI mengimplementasikan SISKOTKLN untuk membantu mencapai strategi tersebut. Menurut BNP2TKI (2017) menyatakan bahwa Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja

Luar Negeri (SISKOTKLN) adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat keluar negeri.

Dalam menjalankan SISKOTKLN tersebut, perlu diketahui menurut Pasal 1 bagian (1) dan Pasal 1 bagian (2) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menyatakan bahwa:

“TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.”

Jumlah TKI Menurut Kawasan Penempatan Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Dimulai dari 0,20% ditahun 2013, kemudian turun menjadi 0,16% ditahun 2014 dan yang terakhir terdata oleh BPS jumlah TKI tahun 2015 sebanyak 0,10%, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 sebanyak 255.461.700 jiwa. (Statistik, 2014) Penurunan jumlah pengiriman TKI berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Karanganyar tersebut, terjadi setelah diterapkannya SISKOTKLN tahun 2011. Padahal dikeluarkannya SISKOTKLN oleh BNP2TKI yang digunakan oleh Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, difungsikan untuk mencapai strategi menyempurnakan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang mudah, murah dan cepat.

Data penurunan jumlah TKI di Kabupaten Karanganyar tersebut hanya tercatat di Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar dan diketahui data jumlah

pengiriman TKI Kabupaten Karanganyar yang tercatat di BNP2TKI tidak mengalami penurunan. (Statistik, 2011-2014) Karena data yang *terupload* di BNP2TKI tidak dapat diakses oleh Dinas, sehingga apabila dalam setahunnya tercatat kurang lebih hanya tiga ratus TKI dari Kabupaten Karanganyar dan di BNP2TKI tercatat kurang lebih seribu TKI dari Karanganyar, itu disebabkan data yang di *upload* di BNP2TKI tidak dapat diakses oleh Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar.

Ketidaksamaan data tersebut dapat berimplikasi pada pengumpulan, pengambilan dan penjagaan data para TKI, yang mana menjadi kurang valid. Karena Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar tidak dapat mengubah data yang telah diunggah di SISKOTKLN. Padahal data mengenai TKI harus diperbaharui sewaktu-waktu, untuk mencegah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap TKI di negara penempatan. Maka alamat majikan daripada TKI harus terbaru, beserta data lainnya yang berkaitan

dengan TKI. Ketidaksamaan data antara Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar dengan BNP2TKI menjadi alasan dipilihnya lokasi penelitian di Karanganyar untuk dijadikan studi lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Strategis SISKOTKLN pada TKI di Kabupaten Karanganyar.”

Digunakannya implementasi strategis karena menurut (Hunger and Wheelen, 2000: 183) implementasi strategis adalah proses dimana strategi dan kebijakan yang dimasukkan ke dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur; Sehingga dengan implementasi strategis, Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar dapat meningkatkan pengembangan program, anggaran dan prosedur pada SISKOTKLN. Alasan yang kedua digunakannya implementasi strategis, dikarenakan implementasi strategis merupakan tahapan manajemen strategis yang digunakan untuk melaksanakan formulasi strategis yang telah diformulasikan sebelumnya. Terdapat implementasi strategis

SISKOTKLN pada TKI di Kabupaten Karanganyar, mampu mendeskripsikan seberapa berhasil perencanaan strategis BNP2TKI dengan SISKOTKLN melalui Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, terhadap kelompok sasaran yaitu para TKI.

Terdapat penelitian sebelumnya yang sama-sama mengkaji mengenai implementasi strategis dan e-HRM yaitu penelitian yang dilakukan oleh (El Amrani, Rowe and Geffroy, 79-104) dengan judul *The effects of enterprise resource planning implementation strategy on cross-functionality* dan penelitian dilakukan oleh (Erdogmus and Esen, 2011) yang berjudul “*An Investigation of the Effects of Technology Readiness on Technology Acceptance in e-HRM*” Penelitian ini mendeskripsikan “Bagaimana Implementasi Strategis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Karanganyar?” dalam merealisasikan strategis BNP2TKI yaitu menyempurnakan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan

penempatan dan perlindungan TKI yang mudah, murah dan cepat. Karena tercatat, masih terdapat perbedaan data jumlah pengiriman TKI Kabupaten Karanganyar di Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar dengan di BNP2TKI.

Metode Penelitian

Menurut (Fuad and Nugroho, 2014: 54) bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang hanya mendeskripsikan tanpa mengevaluasi obyek penelitian yang ditemukan dilapangan. Sehingga alasan teoritis digunakannya kualitatif deskriptif pada penelitian ini, karena obyek penelitian alami ditemukan dilapangan bahwa setelah digunakannya SISKOTKLN, terdapat penurunan jumlah TKI yang berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dimana untuk mencari tahu penyebabnya digunakan instrumen wawancara dalam mengumpulkan data. Alasan teoritis yang kedua adalah fenomenologis (obyek penelitian ditemukan secara natural

dilapangan), juga terdapat alasan interaksi simbolik, yang menurut (Fuad and Nugroho, 2014: 55) apabila terdapat alasan fenomenologis dan interaksi simbolik, maka penelitian dapat dikatakan kualitatif deskriptif. Interaksi simbolik disini ditandai dengan pengaruh dari menurunnya jumlah TKI selama tiga tahun di Karanganyar, berdampak pada menurunnya penerimaan negara yang tercatat tahun 2014 pendapatan pajak daerah Kabupaten Karanganyar yang didalamnya termasuk PPh TKI sebesar Rp. 54.995.000.000,00. (Karanganyar, 2014: 1) Diikuti meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun 2011 sebesar 23.784 jiwa menjadi 25.642 jiwa ditahun 2012. Serta jumlah penduduk miskin meningkat dari 113.693 jiwa menjadi 124.493 jiwa. (RKPD, 2015) Setelah menentukan jenis dan rancangan penelitian maka langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi penelitian. Selain alasan teoritis, terdapat juga alasan metodologis, dimana ditentukannya Karanganyar sebagai lokasi penelitian disebabkan adanya perbedaan data jumlah pengiriman

TKI Kabupaten Karanganyar yang tercatat di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar dengan yang tercatat di BNP2TKI. Perbedaan data tersebut, dijelaskan pada deskripsi lokasi penelitian.

Alasan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Karanganyar, sebab hanya Kabupaten Karanganyar dari tiga puluh lima kabupaten di Jawa Tengah, yang jumlah pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan jumlah pengiriman TKI dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, setelah di implementasikan sistem komputerisasi tenaga kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) tahun 2011. (Statistik, 2010-2014) Dan terdapat perbedaan data terkait penurunan jumlah TKI di Kabupaten Karanganyar yang tercatat di Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar dengan yang tercatat di BNP2TKI.

Menurut (Sugiyono, 2012: 215-216) bahwa penelitian kualitatif berawal dari situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas. Penentuan

informan pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dipilihnya informan-informan di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar dan PT Alkurnia Sentosa Internasional; dikarenakan yang mengurus TKI di Karanganyar dan keempat informan tersebut mengetahui SISKOTKLN digunakan untuk implementasi strategis renstra BNP2TKI tahun 2010 sampai dengan 2014. Sehingga dipilihnya keempat informan tersebut memiliki tujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Selain dengan *purposive sampling*, penentuan informan pada penelitian ini juga dilakukan dengan *snowball sampling*. Dimana informan-informan diluar Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, merupakan saran dari Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PT Alkurnia Sentosa Internasional yaitu dengan melakukan wawancara dengan Eks-TKI, CTKI dan Pelaksana Lapangan (PL).

Menurut (Sugiyono, 2013: 62-63) menyatakan bahwa metode

pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Sedangkan, pada penelitian ini dilihat dari metode pengumpulan data diperoleh dari cara yaitu wawancara yang dilakukan dengan keempat informan; dokumentasi dari TU Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar Badan Pusat Statistik yang diunggah dalam website, terkait TKI dan SISKOTKLN.

Menurut (Sugiyono, 2013: 120-131) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas atau validitas internal, pengujian *transferability* atau validitas eksternal, pengujian *dependability* atau reliabilitas dan pengujian *confirmability* atau obyektivitas. Pada penelitian ini, uji validitas dan reliabilitas data hanya menggunakan tahap pengujian *dependability* atau reliabilitas. Sebab data mengenai implementasi strategis SISKOTKLN pada TKI di Kabupaten Karanganyar diperoleh dengan cara observasi dan wawancara di Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar serta

PT Alkurnia Sentosa Internasional dengan pegawai pemegang SISKOTKLN, Kabid Pelatihan dan Penempatan di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, Kepala Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, serta Direktur PT Alkurnia Sentosa Internasional. Kemudian proses penelitian ini dibimbing oleh dosen pembimbing dalam *mengaudit* hasil penelitian. Sehingga data dapat dikatakan *dependable*, sebab telah dilakukan proses dan ada hasilnya yang kemudian hasilnya di *audit* bersama dengan dosen pembimbing. Jadi dapat dilakukan penelitian ulang dengan kajian yang sama.

Menurut (Prastowo, 2012: 236-238) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditema dan dirumuskan hipotesis kerjanya. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan linier dan hierarkhis (Creswell, 2016: 263). Alasan menggunakan teori (Creswell, 2016) adalah dalam teori ini dijelaskan dengan rinci mengenai cara mengolah data mulai dari

mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, *mengcoding* semua data, menggunakan *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori dan tema yang akan dianalisis, mendeskripsikan kembali dalam narasi dan yang terakhir menginterpretasi dalam data.

Pembahasan

Berdasarkan salah satu strategi BNP2TKI tahun 2010 sampai dengan 2014 yaitu menyempurnakan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang mudah, murah dan cepat; berikut hasil penelitian yang dimasukkan dalam empat dimensi implementasi strategis:

Dimensi manajemen stakeholder menyebutkan bahwa dari keempat informan diperoleh data untuk keberhasilan sebuah implementasi strategis perlu diketahui stakeholder yang terlibat, dan dalam mengidentifikasi stakeholder dapat melalui programs apa yang digunakan, dimana implementasi strategis diterapkan

dan sudahkah dipromosikan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa keempat informan dapat mendeskripsikan program SISKOTKLN; kemudian yang kedua, dari hasil wawancara dengan keempat informan dihasilkan, SISKOTKLN sudah diimplementasikan di seluruh Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten/Kota dan PPTKIS di Indonesia; Ketiga, berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan mengatakan bahwa dikarenakan SISKOTKLN sudah diimplementasikan di seluruh Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten/Kota dan PPTKIS, dan keempat informan berpendapat SISKOTKLN sudah dipromosikan di seluruh Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten/Kota dan PPTKIS di Indonesia, namun yang menjadi kelemahan disini adalah promosi SISKOTKLN tidak dilakukan pada TKI, Eks-TKI dan PL; keempat, dari hasil wawancara dengan keempat informan sepakat mengatakan bahwa dalam menjalankan SISKOTKLN digunakan internet untuk mengoperasikannya; kelima, dari

hasil wawancara dengan keempat informan satu diantaranya yaitu Direktur PT Alkurnia Sentosa Internasional mengatakan bahwa terdapat sistem pelayanan dan penempatan lain, selain SISKOTKLN yaitu ISC (*Immigration Security and Clearance*) dan MiGRAMS (*Migrant Management System*) / FWCMS (*The Foreign Workers Centralized Management System*). Yang fungsinya sama dengan SISKOTKLN. Perbedaannya adalah SISKOTKLN merupakan programs dari BNP2TKI dan dapat digunakan untuk mendata TKI yang mendaftar ke negara manapun yang terdapat hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia, sedangkan ISC (*Immigration Security and Clearance*) dan MiGRAMS (*Migrant Management System*) / FWCMS (*The Foreign Workers Centralized Management System*) merupakan *programs* sistem pelayanan dan penempatan TKI dari pemerintah Malaysia yang dapat digunakan PPTKIS Indonesia dalam menyalurkan TKI khususnya ke Malaysia; Perbedaan yang kedua

adalah SISKOTKLN dioperasikan oleh BNP2TKI, BP3TKI dan PPTKIS, sedangkan ISC (*Immigration Security and Clearance*) dan MiGRAMS (*Migrant Management System*) / FWCMS (*The Foreign Workers Centralized Management System*) dioperasikan oleh Medical dan Imigrasi Malaysia saat TKI membuat *Passport*. Jadi untuk di Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten/Kota di Indonesia hanya menggunakan satu sistem untuk melayani dan menempatkan TKI yaitu SISKOTKLN. Sedangkan di PPTKIS, selain menggunakan SISKOTKLN juga menggunakan ISC dan MiGRAMS/FWCMS khusus untuk PPTKIS resmi yang mempunyai kerjasama dengan pemerintah Malaysia.

Kemudian untuk dimensi keuangan dari hasil penelitian diperoleh, keempat informan mengatakan bahwa modal implementasi strategis berasal dari BNP2TKI, termasuk modal untuk sistemnya. Kecuali untuk modal memasang internet dalam menjalankan SISKOTKLN berasal dari instansi masing-masing. Dan

untuk Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar modal pemasangan internet berasal dari APBD induk level dua; kemudian yang kedua dalam dimensi keuangan, menurut keempat informan, selain modal, anggaran juga berasal dari pusat. Kecuali anggaran internet yang diambilkan dari APBD induk level dua. Sehingga Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PPTKIS tinggal menjalankan saja sistem SISKOTKLN; ketiga, berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan mengatakan bahwa SISKOTKLN sudah dievaluasi beberapa kali, dalam rapat koordinasi antar Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten/Kota dan PPTKIS. Selain itu terdapat pertanggungjawaban, dari Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar yang bertanggungjawab adalah Kepala Dinas. Sedangkan di PPTKIS yang bertanggungjawab seluruh staff yang ID KTP nya terdaftar di BNP2TKI.

Dalam dimensi *research and development* berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, diperoleh data bahwa terdapat tingkat dukungan internal

dan eksternal. Tingkat dukungan internal berupa adanya Bimbingan Teknis dari BNP2TKI yang ditujukan untuk semua pegawai di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar dan PPTKIS resmi di Karanganyar yang menggunakan SISKOTKLN. Kemudian tingkat dukungan eksternal berupa terhungkannya data CTKI yang mendaftar dengan data yang telah ada di DISDUKCAPIL. Sehingga saat CTKI mendaftar untuk dilayani dan ditempatkan sebagai TKI, begitu dipanggil ID nya data kependudukannya langsung keluar; Kemudian yang kedua, dari hasil wawancara dengan keempat informan dihasilkan bahwa pernah ada perbaikan teknologi dari BNP2TKI. Pertama perbaikan sistem login pegawai yang mendaftar para CTKI, dimana sebelum diperbaiki setiap login, pegawai menggunakan *fingerprint*, sedangkan setelah diperbaiki hanya dengan menggunakan NIK yang seterusnya ID sudah tersimpan di SISKOTKLN, sehingga saat login tidak perlu registrasi pegawai lagi. Yang kedua, perbaikan ini malah menimbulkan

masalah dimana perbaikan SISKOTKLN membuat Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar tidak dapat mengedit data mengenai CTKI, seperti misalnya terdapat TKI yang mempunyai nama kecil, dan perlu disertakan di data SISKOTKLN, namun data tersebut tidak dapat diedit setelah perbaikan sistem, karena dapat merubah data kependudukan di DISDUKCAPIL serta yang dapat mengedit data tersebut hanya BNP2TKI, sehingga data TKI yang ada di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar tidak sama dengan BNP2TKI begitu juga PPTKIS; Ketiga, dari hasil wawancara dengan keempat informan, diperoleh data bahwa SISKOTKLN dilakukan inovasi, tetapi fungsi dari SISKOTKLN sejak diimplementasikan tahun 2011 sampai dengan sekarang adalah sama, yaitu untuk mengelola proses-proses aktifitas verifikasi yang berlangsung dalam rangkaian Pelayanan Penempatan TKI.

Dalam dimensi *mangement information system* berdasarkan hasil

wawancara dengan keempat informan, dihasilkan bahwa dengan adanya SISKOTKLN data pelayanan dan penempatan TKI dapat dikumpulkan, diambil, disimpan (sesuai *prosedur*). Namun prosedur pengambilan data TKI dengan SISKOTKLN dapat dikatakan tidak jelas sebab tidak ada ketentuan prosedur pendaftaran, sehingga ada CTKI yang mendaftar di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, ada juga yang mendaftar di PPTKIS serta ada juga yang mendaftar di BNP2TKI, dimana apabila CTKI mendaftar di BNP2TKI data tidak dapat diakses Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PPTKIS Karanganyar. Prosedur pendaftaran dapat dilakukan dengan cara CTKI datang ke Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar untuk mendaftar menjadi TKI; kemudian setelah didaftar ID CTKI muncul yang telah terhubung dengan data di DISDUKCAPIL; kemudian setelah ID keluar baru ID TKI dapat digunakan untuk *medical checkup*; setelah *medical checkup* maka CTKI di PAP atau pembekalan akhir

pemberangkatan. Berbeda dengan di Dinas, di PPTKIS prosedur mengumpulkan, mengambil, dan menyimpan (prosedur merekrut TKI) harus melalui beberapa tahap yaitu mulai dari CTKI datang ke PPTKIS, kemudian membuat JO (*Job Order*) atau DL (*Demand Letter*) yaitu surat perjanjian yang berisikan, perjanjian kerja antara kedua belah pihak yaitu majikan dan agen. Setelah membuat JO maka surat tersebut dimintakan tanda tangan di Konsulat Jendral RI perwakilan yang ada di Negara Penempatan. Kemudian JO yang sudah diregistrasikan ke SISKOTKLN, menunggu *approval* dari P3TKI di Provinsi yang diajukan PPTKIS. Setelah disetujui P3TKI baru keluar SIP (Surat Ijin Pengerahan), setelah SIP keluar maka dapat mengajukan SPR (Surat Pengantar Rekrutmen). Setelah SPR *approved* dari PPTKIS dapat mengajukan kuota yang biasanya kurang lebih 50 orang. Dimana dari semua kuota yang diajukan tadi tidak semua orang, langsung di daftar, melainkan bertahap misalnya 10 orang dulu baru sampai kuota *full*. Sebab ada masa *expired*-nya, jadi

didaftar secara berkala, karena masa berlaku SPR sampai 6 bulan. Jadi dari pengajuan JO, mendapat SIP, keluar SIP mendapat SPR, keluar SPR dengan beberapa persyaratan keluar ID TKI. Beberapa persyaratan untuk mendapatkan ID adalah KTP atau identitas resmi, Akta atau ijazah atau STTB, surat izin orang tua atau wali atau istri yang diketahui kepala desa dengan berstempel, KK, surat permohonan dari PPTKIS dimana agen yang memproses, surat keterangan bahwa TKI mendaftar langsung ke PPTKIS, setelah itu datang ke Dinas dengan membawa semua surat yang telah lolos seleksi di PPTKIS, baru keluar ID keluar, setelah ID keluar, semua informasi mengenai TKI keluar dan dapat digunakan untuk cek kesehatan di *Medical Check Up*. Ketatnya proses pengumpulan, pengambilan dan penyimpanan (prosedur pelayanan dan penempatan TKI) untuk meminimalisir pemalsuan dokumen pemberangkatan TKI, dan ditujukan untuk mengimplementasikan strategis BNP2TKI dalam mewujudkan kelembagaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

yang tangguh; Kemudian yang kedua, dari hasil wawancara dengan keempat informan dihasilkan pernyataan bahwa dalam menjaga informasi terkait pelayanan dan penempatan TKI digunakan *password by user* yang hanya diketahui oleh Kepala Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta pemegang SISKOTKLN. Sedangkan di PPTKIS terdapat juga *password by user* yang mengetahui *password* hanya *staff officer*. Selain itu di PPTKIS, data CTKI di cadangkan berupa database; Ketiga, dari hasil wawancara dengan keempat informan, diperoleh data bahwa dengan adanya SISKOTKLN prosedur pelayanan dan penempatan TKI antara Disdagnakerkop dan UKM dengan PPTKIS sama. Sehingga informasi yang diberikan kepada CTKI mengenai prosedur pendaftarannya pun juga sama. Kesamaan informasi yang diberikan antar instansi tersebut menambah koordinasi antar divisi dalam mewujudkan kelembagaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang tangguh, namun kesamaan

informasi yang diberikan BNP2TKI, Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PPTKIS kepada CTKI tersebut tidak dikoordinasi, karena pada kenyataannya data yang diupload BNP2TKI tidak dapat diakses oleh Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PPTKIS Karanganyar; Keempat dari hasil wawancara diperoleh data bahwa dengan adanya SISKOTKLN dalam mengimplementasikan strategis mewujudkan kelembagaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang tangguh biaya yang dikeluarkan oleh organisasi lebih berkurang. Dibanding dengan menggunakan buku induk yang harus mengurutkan abjad dan ditulis manual.

Penutup

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi strategis sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Karanganyar sudah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat kendala dalam beberapa dimensi,

berikut pemaparannya bahwa Implementasi strategis SISKOTKLN pada TKI di Kabupaten Karanganyar, dilihat dengan dimensi manajemen stakeholder. SISKOTKLN dioperasikan secara *online* berdasarkan strategi BNP2TKI yaitu menyempurnakan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang mudah, murah dan cepat. Untuk mengetahui stakeholder yang terlibat dalam menjalankan SISKOTKLN, perlu diketahui SISKOTKLN sudah digunakan dan dipromosikan oleh Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PT Alkurnia Sentosa Internasional sebagai stakeholder yang diberi wewenang oleh BNP2TKI untuk merekrut TKI di Wilayah Kabupaten Karanganyar. Kendala yang ditemukan dalam dimensi manajemen stakeholder adalah belum dipromosikannya SISKOTKLN pada CTKI, Eks-TKI, dan PL (Pelaksana Lapangan). Hal ini didasari dengan, tidak mengetahuinya CTKI, Eks-TKI dan PL mengenai fungsi SISKOTKLN.

Implementasi strategis SISKOTKLN pada TKI di Kabupaten Karanganyar, dilihat dengan dimensi keuangan sudah baik. Dikatakan demikian karena anggaran dan modal dalam menjalankan SISKOTKLN yang berasal dari BNP2TKI, untuk anggaran terealisasi sebesar 92,89% dari yang telah dianggarkan dan modal terealisasi (96%) dari yang telah ditetapkan. Selain itu, selama penggunaan SISKOTKLN, evaluasi dari BNP2TKI terhadap SISKOTKLN juga telah dilakukan beberapa kali dalam rapat koordinasi antar Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten/Kota.

Implementasi strategis SISKOTKLN pada TKI di Kabupaten Karanganyar, dilihat dengan dimensi *research and development*. Dalam menjalankan implementasi strategis SISKOTKLN pada di TKI di Kabupaten Karanganyar, terdapat dukungan internal dan eksternal. Dukungan internal berupa adanya bimbingan teknis dari BNP2TKI untuk setiap pegawai di Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar serta

PT Alkurnia Sentosa Internasional yang menggunakan SISKOTKLN. Dukungan eksternal berupa terhubungnya data Calon TKI yang mendaftar menjadi TKI dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL). Selain dengan tingkat dukungan, dalam *research and development* untuk menjalankan implementasi strategis SISKOTKLN harus dilakukan perbaikan teknologi. Namun dalam perbaikan teknologi, ditemukan kendala dimana adanya perbaikan teknologi membuat Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar yang tidak dapat memperbaiki data dalam SISKOTKLN, sehingga data yang tercatat di BNP2TKI dengan yang tercatat di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar berbeda. Ditandai setiap tahun jumlah pengiriman TKI dari Kabupaten Karanganyar yang tercatat di BNP2TKI kurang lebih seribu TKI, sedangkan yang tercatat di Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar, jumlah pengiriman TKI dari Karanganyar hanya sekitar tiga ratus TKI.

Implementasi strategis SISKOTKLN pada TKI di Kabupaten Karanganyar, dilihat dengan dimensi *management information system*. Adanya SISKOTKLN dalam melayani, menempatkan dan melindungi TKI jauh lebih efektif dan efisien, dibanding dengan buku induk, karena setiap aktivitas pada SISKOTKLN *by system* yang selalu diperbaharui datanya. Meskipun penggunaan SISKOTKLN lebih efektif dan efisien, diketahui bahwa prosedur pengumpulan, pengambilan dan penjagaan data TKI yang ketat dengan SISKOTKLN karena digunakan *password* pada setiap input data TKI, tidak diikuti dengan adanya ketegasan yang diinformasikan kepada CTKI. Mengenai CTKI harus mendaftar di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, PPTKIS atau di BNP2TKI. Ketegasan yang diberikan pada CTKI untuk mendaftar di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar atau di BNP2TKI, agar data CTKI selalu dapat diperbaharui ketika menjadi TKI. Karena Dinas sudah tidak dapat memperbaharui

data TKI yang sudah terdaftar dalam SISKOTKLN. Kurangnya ketegasan dalam pengumpulan, pengambilan dan penjagaan data TKI dapat dikatakan bahwa koordinasi antara Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar dengan BNP2TKI belum dijalankan dengan baik, karena data yang diunggah oleh BNP2TKI tidak dapat diakses oleh Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PT Alkurnia Sentosa Internasional.

Untuk memperbaiki implementasi strategis SISKOTKLN pada TKI di Kabupaten Karanganyar, berikut beberapa saran yang dikeluarkan untuk mengatasi kendala pada dimensi manajemen stakeholder, *research and developmemt* dan *management information system* yaitu dalam dimensi manajemen stakeholder, masih banyak TKI yang tidak paham mengenai fungsi SISKOTKLN, karena SISKOTKLN tidak disosialisasikan pada CTKI, Eks-TKI dan PL. Untuk mengatasi hal tersebut, Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar perlu mensosialisasikan fungsi

SISKOTKLN pada CTKI, TKI dan Eks-TKI. Sehingga CTKI, TKI maupun eks-TKI mengetahui fungsi SISKOTKLN penting, untuk pelayanan, penempatan dan perlindungan terhadap TKI di negara penempatan dan tidak ada CTKI yang memalsukan data saat mendaftar menjadi TKI. Dalam dimensi *research and development*, perbaikan teknologi pada SISKOTKLN, mengakibatkan Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar tidak dapat mengubah data yang telah diunggah dalam SISKOTKLN. Menangani kendala tersebut, seharusnya BNP2TKI menjadikan Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PT Alkurnia Sentosa Internasional sebagai *editor* dalam SISKOTKLN yang ikut berperan langsung dalam melengkapi data TKI. Dalam dimensi *management information system*, tidak adanya ketegasan yang diinformasikan kepada CTKI, terkait prosedur pendaftaran menjadi TKI, apabila mendaftar di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, PPTKIS atau di BNP2TKI. Menangani hal

tersebut, BNP2TKI sebaiknya memberikan transparansi informasi melalui pamflet atau website BNP2TKI, bahwa CTKI yang mendaftar menjadi TKI harus di BNP2TKI. Karena CTKI yang mendaftar menjadi TKI di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar keberlanjutan data tidak dapat diperbaharui.

Daftar Pustaka

- Baedhowi. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Semarang: PELITA INSANI Semarang.
- Bekkering, G. E., Engers, A. J., Wensing, M., Hendriks, H. J., Tulder, M. W., Oostendorp, R. A., et al. (2003). Development of an implementation strategy for physiotherapy guidelines on low back pain. *Volume 49, Issue 3*, 208-214.
- BNP2TKI. (t.thn.). *apllikasi online sisko tkln*. Dipetik March 10, 2017, dari <http://siskotkln.bnp2tki.go.id/>: <http://siskotkln.bnp2tki.go.id/>
- BNP2TKI. (2012). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BNP2TKI*. Jakarta: BNP2TKI.
- BNP2TKI. (2015, May 20). *Renstra Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi*. Dipetik March 15, 2017, dari BNP2TKI: <http://siskotkln.bnp2tki.go.id/>
- Bryman, A. (2008). *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press.
- Bryson, J. M. (2005). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Chimhanzi, J., & Morgan, R. E. (2005). Explanations from the marketing/human resources dyad for marketing strategy implementation effectiveness in service firms. *Journal of Business Research, Volume 58, Issue 6*, 787–796.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- CTKI. (2017, June 4). Implementasi Strategi Terwujudnya Kelembagaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang Tangguh Kabupaten Karanganyar. (Resa, Pewawancara)
- David J, K. J., & Shook, C. L. (1996). The Application of Cluster Analysis in Strategic Management Research: An Analysis and Critique.

- Strategic Management Journal Vol. 17, No. 6*, 441-458.
- David, F. R. (2007). *Strategic Management Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- David, F. R. (2007). *Strategic Management Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Davis, G. B. (1999). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Eks-TKI. (2017, June 4). Implementasi Strategi Terwujudnya Kelembagaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang Tangguh Kabupaten Karanganyar. (Resa, Pewawancara)
- El Amrani, R., Rowe, F., & Geffroy, B. (79-104). The effects of enterprise resource planning implementation strategy on cross-functionality. *Volume 16, Issue 1*, 2006.
- Ellitan, L., & Anatan, L. (2009). *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Praktis*. Bandung: Alfabeta CV.
- Erdogmus, N., & Esen, M. (2011). An Investigation of the Effects of Technology Readiness on Technology Acceptance in e-HRM. *Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 24, 2011*, 487-495.
- Erdogmus, N., & Esen, M. (2011). An Investigation of the Effects of Technology Readiness on Technology Acceptance in e-HRM. *Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 24*, 487-495.
- Fajar, S. A., & Heru, T. (2010). *Manajemen Sumberdaya Manusia Sebagai Dsar Meraih Keunggulan Bersaing*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hariandja, M. T. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produksi Pegawai*. Jakarta: PT Grasindo.
- Howard, M. (2001, August). e-Government Across the Globe How Will "e" Change Government? *Government Finance Review*, hal. 6-9.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2000). *Strategic Management Seventh Edition*. Prentice Hall: United States of America.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2000). *Strategic Management Seventh Edition*. Prentice Hall: United States of America.
- Husni, M. (2016). *Academia Education. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hal. 1-7.

- Jannah, K. M. (2016). *TKI Sumbang Devisa Negara Rp144,95 Triliun di 2015*. Indonesia: Okezone.com.
- Jeffrey G., C., & Dennis P, S. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. *Volume 10, Issue 1*, 75–87.
- Joseph, R. C. (2009). E-Government and E-HRM in the Public Sector. *Encyclopedia of Human Resources Information Systems: Challenges in e-HRM*, 1-6.
- Joseph, R. C. (2009). E-Government and E-HRM in the Public Sector. *Encyclopedia of Human Resources Information Systems: Challenges in e-HRM*, 1-6.
- Karanganyar, K. D. (2017, May 15). Implementasi Strategi Terwujudnya Kelembagaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang Tangguh dengan SISKOTKLN. (Resa, Pewawancara)
- Karanganyar, P. K. (2016, Desember 3). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016*. Dipetik Desember 3, 2016, dari karanganyarkab.go.id: <http://www.karanganyarkab.go.id/20160128/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-2016/>
- Karanganyar, P. K. (2014, May 13). *Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2014*. Dipetik December 17, 2016, dari <http://karanganyarkab.go.id>: <http://www.karanganyarkab.go.id/wp-content/uploads/2014/09/lampiran-1-perda-apbd-2014.pdf>
- Karanganyar, P. K. (2014, May 13). *Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2014*. Dipetik December 17, 2016, dari <http://karanganyarkab.go.id>: <http://www.karanganyarkab.go.id/wp-content/uploads/2014/09/lampiran-1-perda-apbd-2014.pdf>
- Kementerian Pekerjaan Umum, P. R. (1996). *ehrm.pi.go.id*. Dipetik November 10, 2016, dari E-HRM PUPR: <http://ehrm.pu.go.id/pupr/simka-1>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2007). *Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lengnick-Hall, C. A., & Mark, L.-H. L. (1988). Strategic Human Resources Management: A Review of the Literature and a Proposed Typology. *Academy of Management, vol. 13, no. 3*, 454-470.
- Mahoney, J. T., & Pandian, J. R. (1992). The resource-based view within the conversation of strategic management. *Volume 13, Issue 5*, 363-380.
- Man Power, P. (2011). Dipetik June 8, 2017, dari www.prochamp.com.my: www.prochamp.com.my
- McLeod, J. R. (1998). *Management Information Systems*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nawawi, H. (2012). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho, E. (2008). *Sistem Informasi Manajemen Konsep, Aplikasi, dan Perkembangan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- O' Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2014). *Management Information Systems, 9th ed*. Jakarta: McGraw-Hill Education (Asia) and Salemba Empat.
- Pearce II, J. A., & Robinson, J. R. (2013). *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pelaksana, L. (2017, June 4). Implementasi Strategi Terwujudnya Kelembagaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang Tangguh Kabupaten Karanganyar. (Resa, Pewawancara)
- Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, K. B. (2017, May 2). Implementasi Strategi Terwujudnya Kelembagaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang Tangguh dengan SISKOTKLN. (Resa, Pewawancara)
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- PT Alkurnia Sentosa Internasional, D. (2017, June 4). Implementasi Strategi Terwujudnya Kelembagaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang Tangguh dengan SISKOTKLN. (Resa, Pewawancara)
- RKPD, K. (2015, January). *RKPD Kabupaten Karanganyar 2015*. Dipetik October 12, 2016, dari [karanganyarkab.go.id: http://www.karanganyarkab.go.id/wp-content/uploads/2014/09/RKPD-2015.pdf](http://www.karanganyarkab.go.id/content/uploads/2014/09/RKPD-2015.pdf)
- Rofiaty, Noviyanti, T., & Mulyanto, A. D. (Maret 2015,). Pengaruh Knowledge Management Terhadap Inovasi, Implementasi Strategi dan Kinerja Organisasi (Studi Pada RS Lavalette Malang). *Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 20, Nomor 1*, halaman 1-52.
- Ruel, H., & Bondarouk, T. (2004). E-HRM : Innovation or Irritation. *Association for Information Systems AIS Electronic Library (AISeL)*, 1-14.
- Rusdiana, A., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi*

- Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rusdiana, A., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2007). *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- SISKOTKLN, P. (2017, Mei 2). Implementasi Strategi Terwujudnya Kelembagaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang Tangguh dengan SISKOTKLN di Kabupaten Karanganyar. (Resa, Pewawancara)
- Sofyandi, H. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Statistik, B. P. (2016, September 16). *Jumlah TKI Menurut Kawasan Penempatan 2013, 2014 dan 2015*. Dipetik Oktober 3, 2016, dari BPS WEB SITE: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1808>
- Statistik, B. P. (2014, 18 2). *Proyeksi Penduduk menurut provinsi, 2010 - 2035*. Dipetik 10 3, 2016, dari BPS WEB SITE: <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274>
- Statistik, B. P. (2010-2014). *Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Dipetik October 3, 2016, dari BPS WEB SITE: <http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1178>
- Statistik, B. P. (2016). *Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Dipetik October 3, 2016, dari BPS WEB SITE: <http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1178>
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Sunyoto, D. (2014). *Sistem Informasi Manajemen Perspektif Organisasi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: ANDI.
- Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: ANDI.
- Suyati. (2016, 10 24). *Pendataan TKI*. (R. Pratiwi, Pewawancara)